



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI DAN PPUU DPD RI  
ATAS PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2021 DAN PROLEGNAS RUU  
PERUBAHAN TAHUN 2020-2024 PADA RAKER TANGGAL 14 JANUARI 2021**

**TANGGAL 9 MARET 2021**

Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	1 (satu)
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Selasa. 09 Maret 2021
P u k u l	:	10.35 s/d 12.13 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	Pengambilan keputusan hasil penyempurnaan/penyesuaian Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 yang telah diputuskan pada Raker tanggal 14 Januari 2021.
Ketua Rapat	:	Supratman Andi Agtas, SH, MH (Fraksi Partai Gerindra)
Hadir	:	Virtual 27 Orang, Fisik 31 Orang dan Ijin 3 Orang.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Undangan	:	- Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran; - Pimpinan PPUU DPD RI beserta jajaran

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan MAM dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam rangka Pengambilan keputusan atas penyempurnaan/penyesuaian Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 yang telah diputuskan pada Raker tanggal 14 Januari 2021 dipimpin dan dibuka oleh Ketua Baleg Supratman Andi

Agtas, SH, MH pukul 10.35 WIB dan rapat terbuka untuk umum. Selanjutnya ketua menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Ketua PPUU DPD RI untuk memberikan tanggapan/masukan dan kepada perwakilan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan mini fraksi.

## **II. KESIMPULAN**

Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Penyempurnaan/penyesuaian Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021 dan perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024, menyetujui untuk menyetujui:

1. RUU tentang Pemilihan Umum ditarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan digantikan dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diusulkan oleh Pemerintah.
2. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang semula diusulkan oleh Anggota DPR menjadi usulan Badan Legislasi.
3. Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) RUU.
4. Jumlah Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) RUU.

## **III. PENUTUP**

Rapat Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam rangka Pengambilan keputusan atas penyempurnaan/penyesuaian Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 yang telah diputuskan pada Raker tanggal 14 Januari 2021 ditutup pukul 12.13 Wib

Jakarta, 9 Maret 2021  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001